Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

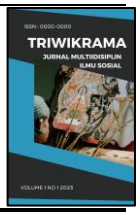

DAMPAK INDUSTRIALISASI TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL DAN PERGESERAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG

Bunga Anjeli

Universitas Indraprasta PGRI

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

bungaanjeli2801@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Transformasi Kabupaten Karawang dari wilayah agraris menjadi pusat industri merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan modernisasi yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis dinamika transformasi tersebut dengan menggunakan perspektif Teori Modernisasi serta kritik dari Teori Ketergantungan dan konsep Accumulation by Dispossession. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terkait perkembangan kawasan industri di Karawang. Hasil kajian menunjukkan bahwa industrialisasi telah mendorong peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan struktur ekonomi. Namun, di sisi lain, proses tersebut memunculkan berbagai persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian, marginalisasi petani, ketimpangan relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, serta melemahnya kedaulatan agraria. Selain itu, kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal belum berjalan optimal akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan. Transformasi ekonomi juga berdampak pada perubahan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju pola kehidupan yang lebih konsumtif dan individualistis. Oleh karena itu, pembangunan industri di Karawang perlu diarahkan pada kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat lokal agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan terwujudnya keadilan sosial dan keberlanjutan budaya.

Kata kunci: transformasi industri, alih fungsi lahan, Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, Kabupaten Karawang.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

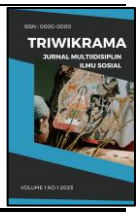

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Karawang secara historis menyandang predikat sebagai "Lumbung Padi Nasional" yang merepresentasikan identitas masyarakat agraris yang kuat di Jawa Barat. Namun, seiring dengan masifnya arus pembangunan nasional, wilayah ini mengalami transformasi drastis menjadi salah satu pusat industri terbesar. Fenomena alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non-pertanian menjadi indikator utama dari dinamika pembangunan ini. Data menunjukkan bahwa laju konversi lahan terjadi secara aktif dengan rata-rata mencapai 6,39 ha per tahun, bahkan di titik tertentu mencapai angka yang jauh lebih tinggi. Pendorong utama dari fenomena ini adalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani serta penurunan produktivitas tanah yang memaksa lahan-lahan produktif beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun pemukiman, sebagaimana dijelaskan dalam (Saputri, 2024).

Dampak dari pembangunan ini tidak hanya terbatas pada perubahan fisik tata ruang, tetapi juga merambat secara mendalam ke dalam struktur sosiokultural masyarakat. Kehadiran kawasan industri dalam satu dekade terakhir telah mengubah pola kebudayaan dan mata pencaharian, di mana penduduk yang semula bekerja sebagai petani kini bertransformasi menjadi buruh pabrik, pedagang, hingga pekerja sektor jasa. Meskipun pembangunan ini membawa dampak positif berupa perbaikan fasilitas publik seperti akses jalan, peningkatan kualitas sarana pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih memadai, di sisi lain ia menciptakan tantangan adaptasi yang besar bagi masyarakat lokal. Sebagaimana diungkapkan dalam (Ramadhani & Nisa, 2020), pergeseran pola mata pencaharian ini menandakan adanya perubahan struktur sosial dari masyarakat komunal-agraris menuju masyarakat industri yang lebih individualis-kontraktual, yang menuntut kesiapan sosial agar penduduk asli tidak terpinggirkan di tanahnya sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transformasi Kabupaten Karawang dari daerah agraris menuju pusat industri memengaruhi perubahan stratifikasi sosial dan pola relasi masyarakat lokal?
2. Sejauh mana kebijakan pembangunan industri di Karawang berkontribusi terhadap marginalisasi sosial-ekonomi penduduk asli di tengah dominasi tenaga kerja pendatang?
3. Bagaimana pergeseran nilai budaya dan gaya hidup masyarakat lokal sebagai bentuk adaptasi terhadap penetrasi budaya industri dan modernitas?

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

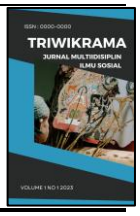

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis dampak pembangunan industri terhadap perubahan struktur dan stratifikasi sosial masyarakat di Kabupaten Karawang.
2. Mengevaluasi kaitan antara kebijakan pembangunan negara dengan munculnya ketimpangan atau marginalisasi sosial pada masyarakat lokal Karawang.
3. Mengidentifikasi perubahan nilai budaya dan gaya hidup masyarakat sebagai respons terhadap modernisasi dan industrialisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara teoretis, pembangunan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Teori Modernisasi yang memandang perubahan sosial sebagai proses evolusi dari masyarakat tradisional-agraris menuju masyarakat modern-industri. Dalam perspektif ini, pembangunan dipahami sebagai upaya sadar untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa melalui efisiensi administrasi dan penguatan sumber daya manusia. Berdasarkan analisis dalam (F. Setiawan, 2019), teori modernisasi memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk menciptakan "kemajuan" yang terukur, di mana masyarakat didorong untuk mengadopsi nilai-nilai rasionalitas dan teknologi. Di Karawang, hal ini terlihat dari perubahan struktur ekonomi yang digeser secara paksa dari sektor pertanian menuju industrialisasi sebagai simbol pencapaian kesejahteraan nasional.

Dalam implementasinya, terdapat konsep kunci yang menghubungkan pembangunan dengan perubahan sosial, yaitu peran negara, kekuasaan, dan kebijakan pembangunan yang termanifestasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Negara menggunakan otoritasnya untuk menetapkan wilayah industri (pusat pertumbuhan), yang secara otomatis merombak tatanan sosial masyarakat sekitar. Menurut (Atthahara & Rizki, 2019), kebijakan pembangunan ini bukan sekadar pengaturan lahan, melainkan wujud kekuasaan negara dalam mendisposisikan sumber daya. Dampaknya, muncul pergeseran strata sosial dan tantangan kependudukan seperti urbanisasi masif. Konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan adalah alat transformasi yang sangat kuat dalam menentukan nasib masyarakat lokal di tengah arus industrialisasi.

Sebagai sintesis teori, perbandingan antara narasi kemajuan modernisasi dengan realita sosial di lapangan menuntut adanya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kritik terhadap modernisasi yang cenderung fokus pada pertumbuhan ekonomi

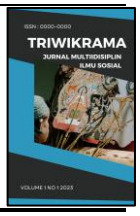

semata dijawab dengan gagasan pembangunan alternatif yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Sebagaimana disimpulkan dalam (Handini et al., 2025), negara tidak boleh hanya berperan sebagai administrator pertumbuhan, tetapi harus menjadi inovator yang mampu menyelaraskan potensi ekonomi lokal dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sintesis ini menekankan bahwa perubahan sosial akibat pembangunan hanya akan membawa kesejahteraan sejati jika kebijakan yang diambil bersifat adaptif, kolaboratif, dan mampu melindungi masyarakat dari risiko marginalisasi struktural.

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena perubahan sosial akibat pembangunan melalui analisis berbagai teks dan dokumen ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, khususnya perspektif sosiologi pembangunan, untuk membedah relasi antara kebijakan negara, transformasi struktur sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di Kabupaten Karawang.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini sepenuhnya merupakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang relevan, yang meliputi jurnal ilmiah yaitu artikel-artikel penelitian dari Google Scholar yang membahas industrialisasi dan perubahan sosial di Karawang.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif-analitis serta analisis komparatif teoretis. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur diidentifikasi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk menggambarkan fakta pembangunan secara objektif. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dengan membenturkan data lapangan di Karawang terhadap Teori Modernisasi dan Teori Ketergantungan. Hal ini dilakukan guna

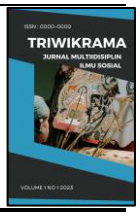

menghasilkan sintesis kritis yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis secara tajam mengenai arah dan dampak sosiologis dari kebijakan pembangunan tersebut.

PEMBAHASAN

Transformasi Kabupaten Karawang dari daerah agraris menuju pusat industri merupakan manifestasi nyata dari proyek modernisasi negara yang bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Fenomena ini secara teoretis dapat dijelaskan melalui kacamata Teori Modernisasi, khususnya tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Walt Whitman Rostow. Berdasarkan data dalam (Andin H. Taryoto, Kamsiah, Ina Restuwati, 2014), kebijakan pembangunan di Karawang mencerminkan upaya sistematis untuk menggeser struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier guna mencapai tahap tinggal landas (take-off). Peran negara di sini sangat dominan melalui instrumen hukum seperti Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 yang menetapkan kawasan peruntukan industri seluas ribuan hektar. Dari perspektif modernisasi, negara memposisikan diri sebagai administrator pembangunan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan investasi, perluasan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur fisik yang masif sebagai simbol kemajuan bangsa.

Namun, narasi kemajuan yang dijanjikan oleh Teori Modernisasi tersebut mendapat tantangan serius dari kenyataan sosiologis di lapangan yang lebih tepat dibedah menggunakan kritik dari Teori Ketergantungan atau perspektif Accumulation by Dispossession dari David Harvey. Analisis dalam (Abbas et al., 2023) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Karawang bukan sekadar perubahan fungsi ruang, melainkan wujud akumulasi modal melalui peminggiran hak-hak masyarakat lokal. Di sinilah relasi kekuasaan yang timpang terlihat jelas; negara sering kali berkolaborasi dengan korporasi besar dalam mengamankan lahan, sementara posisi petani sebagai pemilik lahan asli justru terdesak secara struktural. Kritik ini menegaskan bahwa pembangunan yang bersifat "top-down" cenderung menciptakan ketergantungan baru, di mana masyarakat lokal kehilangan akses terhadap alat produksinya (tanah) dan dipaksa masuk ke dalam sistem pasar industri tanpa modalitas sosial maupun pendidikan yang memadai. Sebagaimana dicatat dalam (Nurzaman & Adharani, 2024), kondisi ini diperparah oleh tekanan ekonomi yang membuat petani menjual lahan mereka bukan untuk investasi produktif,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

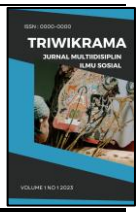

melainkan demi kebutuhan konsumtif jangka pendek, yang pada akhirnya memicu hilangnya kemandirian pangan dan kedaulatan agraria di tingkat lokal.

Dampak sosial dari arah pembangunan yang elitis ini menciptakan paradoks ketenagakerjaan dan degradasi nilai budaya di tengah masyarakat Karawang. Meskipun negara mencoba melakukan intervensi melalui kebijakan afirmatif, seperti regulasi penyerapan 60% tenaga kerja lokal, implementasinya di lapangan terbukti tidak efektif. Berdasarkan temuan (Yusinta Hidayat et al., 2024), angka pengangguran lokal tetap fluktuatif karena kesenjangan kualifikasi SDM dan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik percaloan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam pembangunan industri lebih banyak menguntungkan kelompok pemilik modal dan tenaga kerja pendatang yang lebih terampil, sedangkan penduduk asli mengalami marginalisasi di tanah mereka sendiri. Secara sosiologis, perubahan struktur ekonomi ini juga merombak total nilai budaya dan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Penetrasi budaya industri telah menggeser pola hubungan komunal yang bersahaja menjadi pola konsumerisme yang kompetitif dan hedonistik, sebagaimana dibuktikan dalam (Nadia et al., 2025) mengenai perilaku keuangan Generasi Z di Karawang. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang inklusif dan berpihak pada perlindungan rakyat lokal, pembangunan industri hanya akan menjadi alat transformasi fisik yang mengabaikan keadilan sosial dan keutuhan tatanan budaya masyarakat setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan industri di Kabupaten Karawang telah memicu transformasi struktur sosial yang mendalam, di mana masyarakat agraris yang bersifat komunal kini bergeser menjadi masyarakat industri yang lebih individualis dan kontraktual. Kebijakan pembangunan yang bersifat "top-down" terbukti menciptakan paradoks; di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi makro, namun di sisi lain memicu marginalisasi penduduk asli akibat relasi kekuasaan yang lebih berpihak pada pemilik modal. Ketidaksiapan sumber daya manusia lokal dalam menghadapi kualifikasi industri menyebabkan masyarakat asli terjepit dalam pengangguran struktural atau sektor informal yang tidak stabil. Secara budaya, penetrasi nilai-nilai modernitas telah mendistorsi gaya hidup masyarakat lokal, terutama generasi muda, menuju pola konsumerisme dan hedonisme yang mengikis nilai-nilai tradisional dan kemandirian ekonomi agraris.

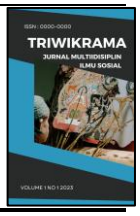

B. Saran

Guna meminimalisir dampak negatif dari pembangunan yang elitis, pemerintah daerah perlu mengadopsi model pembangunan alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif. Pertama, diperlukan penguatan regulasi penyerapan tenaga kerja lokal melalui pengawasan ketat serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki program link and match dengan kebutuhan industri nyata. Kedua, pemerintah harus konsisten dalam melindungi lahan pertanian abadi untuk menjaga kedaulatan pangan dan identitas sejarah Karawang sebagai lumbung padi. Ketiga, pembangunan ke depan tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi fisik, melainkan juga pada pembangunan kapasitas sosial dan proteksi budaya lokal, agar modernisasi tidak berujung pada hilangnya jati diri dan pemiskinan struktural masyarakat pribumi di tanahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, R. R., Nuvida, R. A., & Rezeky, S. M. (2023). Keterlibatan Aktor Dalam Konflik Lahan Di Teluk Jambe Barat, Karawang. *Nasional Sosiologi (PKNS)*, *1*(2), 7–9. https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/119%0Ahttps://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/119/116

Andin H. Taryoto, Kamsiah, Ina Restuwati, T. S. (2014). *Analisis Pengembangan Industri dan Persepsi Kepala Desa di Kawasan Peruntukan Industri: Kasus di Kabupaten Karawang*. (2008), 72–87.

Atthahara, H., & Rizki, M. F. (2019). Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, *1*(1), 9–21. https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1642

F. Setiawan. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, *8*(2), 59–60. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/1033/1814

Handini, N., Mely Darwina, Yudistira, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *2*(5), 964–986. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5793

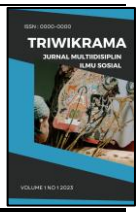

Nadia, A., Maulana, A., Sajekti, T., & Syarif, D. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Konformitas , Gaya Hidup Hedonisme , dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Generasi Z di Kabupaten Karawang*. *7*(1), 203–211.

Nurzaman, R. A., & Adharani, Y. (2024). Alih fungsi lahan pertanian di kecamatan klari kabupaten karawang berdasarkan penerapan hak fungsi sosial hak atas tanah. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, *3*(1), 114–122. https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/4797

Ramadhani, K. I., & Nisa, A. N. S. (2020). Perubahan Sosial Masyarakat Desa Puseurjaya Kabupaten Karawang Sebagai Dampak Pembangunan Kawasan Industri. *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS*, *2*(1), 40–45. https://doi.org/10.15294/sosiolium.v2i1.39935

Saputri, Y. A. (2024). *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang*. *2*, 306–312.

Yusinta Hidayat, Lutfi Fahrul Rizal, & Aji Saptaji. (2024). Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Unes Law Review*, *6 No. 4*(4), 11809–11817.